

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PAD atau pendapatan asli daerah merupakan fundamental atau pondasi dalam perekonomian daerah. Hal tersebut dikarenakan PAD digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Apabila suatu daerah tidak memiliki PAD maka hanya akan menjadi beban pemerintah pusat dan segala tujuan pembangunan daerah tidak akan dicapai dengan maksimal. Pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber-sumber potensial yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan pajak perhotelan serta masih banyak unit-unit sumber lain (Pandelaki, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah umumnya diperoleh atas penerimaan dari masyarakat berupa pajak dan retribusi serta pendapatan lain-lain.

UU Otonomi Daerah memberikan wewenang khusus kepada seluruh daerah baik kabupaten maupun provinsi untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga segala hal pembangunan dan target-target ekonomi mestinya dibiayai oleh sendiri. Pembiayaan itu memerlukan sumber pendapatan sehingga daerah memiliki hak untuk memungut atau mengenakan pajak dan retribusi atas pemanfaatan sesuatu oleh masyarakat atau perusahaan sebagai wajib pajak. Dengan demikian, maka PEMDA memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan produktivitas mereka. Selain dari pemungutan wajib ke masyarakat, PEMDA

memiliki hak untuk menggali sumber-sumber potensial yang dapat dijadikan sumber pendapatan mereka (Sari & Miftahuljannah, 2019).

Berdasarkan uraian diatas mengenai otonomi daerah, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD memang demikian memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat memberikan wewenang demikian dengan alasan sebuah daerah dapat memiliki kemajuan dengan target-target mereka sendiri. Konsep desentralisasi ini, juga dapat mempermudah pemerintah pusat dalam mengontrol program kerja pusat sehingga dapat terkordinir dengan baik dan merata. Upaya desentralisasi juga mempermudah pemerintah pusat dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Fakta menunjukan bahwa untuk melaksanakan desentralisasi tersebut, pemerintah daerah membutuhkan biaya dan tidak diperkenankan untuk selalu bergantung kepada APBN. Ia mesti membiayai APBD nya sendiri walaupun memiliki alokasi atau anggaran khusus dari pusat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pentingnya analisis efektivitas dan kontribusi PAD.

Analisis efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah menjadi hal yang penting mengingat PAD merupakan instrumen vital pembangunan. Pemerintah Daerah membutuhkan informasi-informasi yang valid dan ilmiah untuk membuat keputusan atau kebijakan untuk meningkatkan valuasi PAD mereka. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan sumber PAD yang bersumber dari pajak daerah. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan studi kasus di Kabupaten

Ciamis. Pajak daerah memiliki valuasi yang tinggi namun jika pemungutannya tidak efektif dan efisien maka target-target yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan secara maksimal. (Wahyuni & Arief, 2020) mengkonfirmasi bahwa pajak daerah merupakan sumber PAD yang vital atau penting.

Menurut (Pandelaki, 2021) prestasi kinerja keuangan dapat dilihat dari rasio efektivitas penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan paling dominan. Semakin efektif sebuah sumber pendapatan daerah maka Pemerintah tersebut dikatakan berprestasi dalam hal pemungutan, pelayanan dan pemanfaatan dana hasil pendapatan asli daerah. Adapun analisis kontribusi itu sendiri, memberikan interpretasi unit-unit mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD dan unit tersebut harus diprioritaskan dalam hal pemungutan dan pelayanan. Pajak daerah merupakan salah satu pungutan yang manfaatnya tidak langsung diterima oleh masyarakat sehingga pengelolaan serta pemanfaatan harus dilakukan secara efektif dan efisien mungkin sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya atas pungutan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

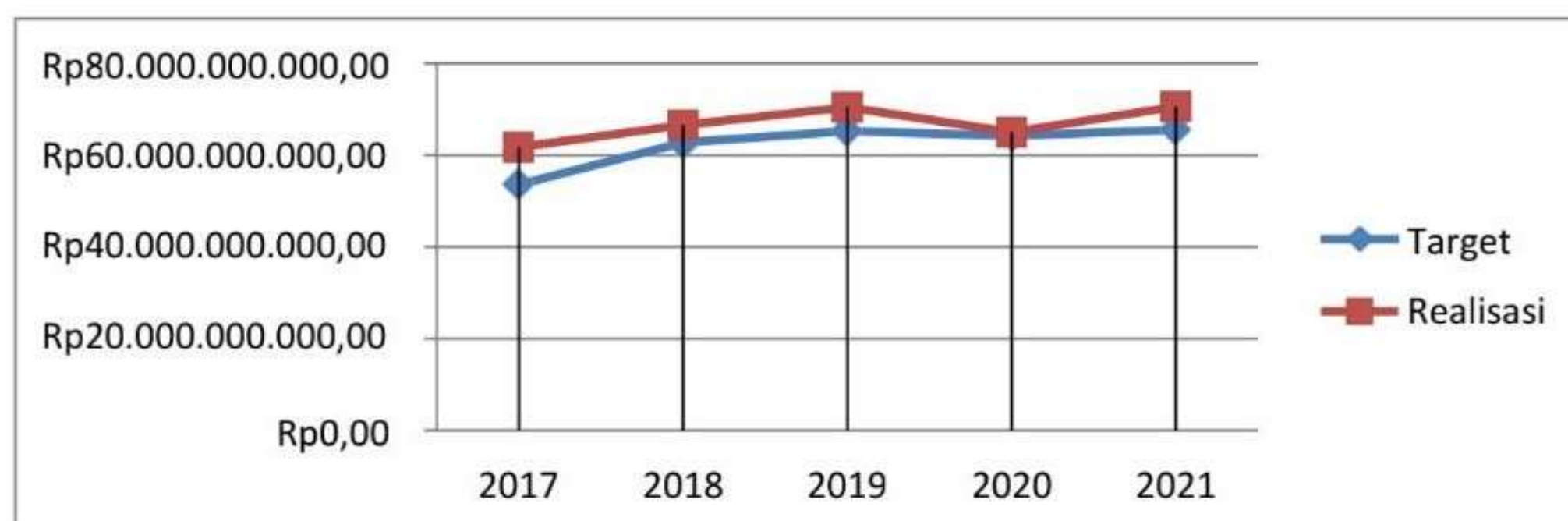
Berdasarkan definisi yang lebih rinci, pajak daerah didefinisikan sebagai suatu pungutan wajib bagi wajib pajak yang telah ikut serta memiliki atau memanfaatkan suatu materil tertentu (Pratama et al., 2019). Adapun wajib pajak yang dimaksud dapat berupa perorangan atau pribadi dan badan. Pungutan pajak daerah ini tidak memberikan imbalan secara langsung seperti retribusi daerah. Masyarakat sebagai wajib pajak tidak tahu secara langsung kemana uang pajak itu beredar atau

dibelanjakan. Namun, pungutan pajak daerah memiliki tujuan untuk pembangunan-pembangunan seperti pembiayaan APBD, memberikan gaji kepada pegawai negeri sipil, dan membiayai kebutuhan-kebutuhan lain yang memiliki relevansi dengan pembangunan atau pertumbuhan suatu daerah.

Setiap menjelang tahun APBD atau tahun perumusan APBD, maka Pemerintah Daerah perlu memperhitungkan perkiraan pendapatan yang masuk. Hal tersebut agar APBD dapat dibiayai, tidak defisit atau kekurangan dana. Perhitungan efektivitas pajak daerah merupakan bagian dari aktivitas tersebut. Efektivitas pajak daerah umumnya membandingkan antara target penerimaan yang telah dibuat dengan realisasi yang berhasil direalisasikan. Oleh karena itu, dasar keputusan perhitungan efektivitas pajak daerah adalah jika realisasi melebihi target maka bisa disimpulkan bahwa efektivitas pajak daerah sangat efektif dan berlaku situasi sebaliknya.

Berikut ini disajikan sebuah visual data yang bersumber dari BPKD Kabupaten Ciamis, mengenai perbandingan target pendapatan pajak daerah dan valuasi yang berhasil diperoleh.

Grafik 1. Target & Realisasi Pajak Daerah Kab. Ciamis



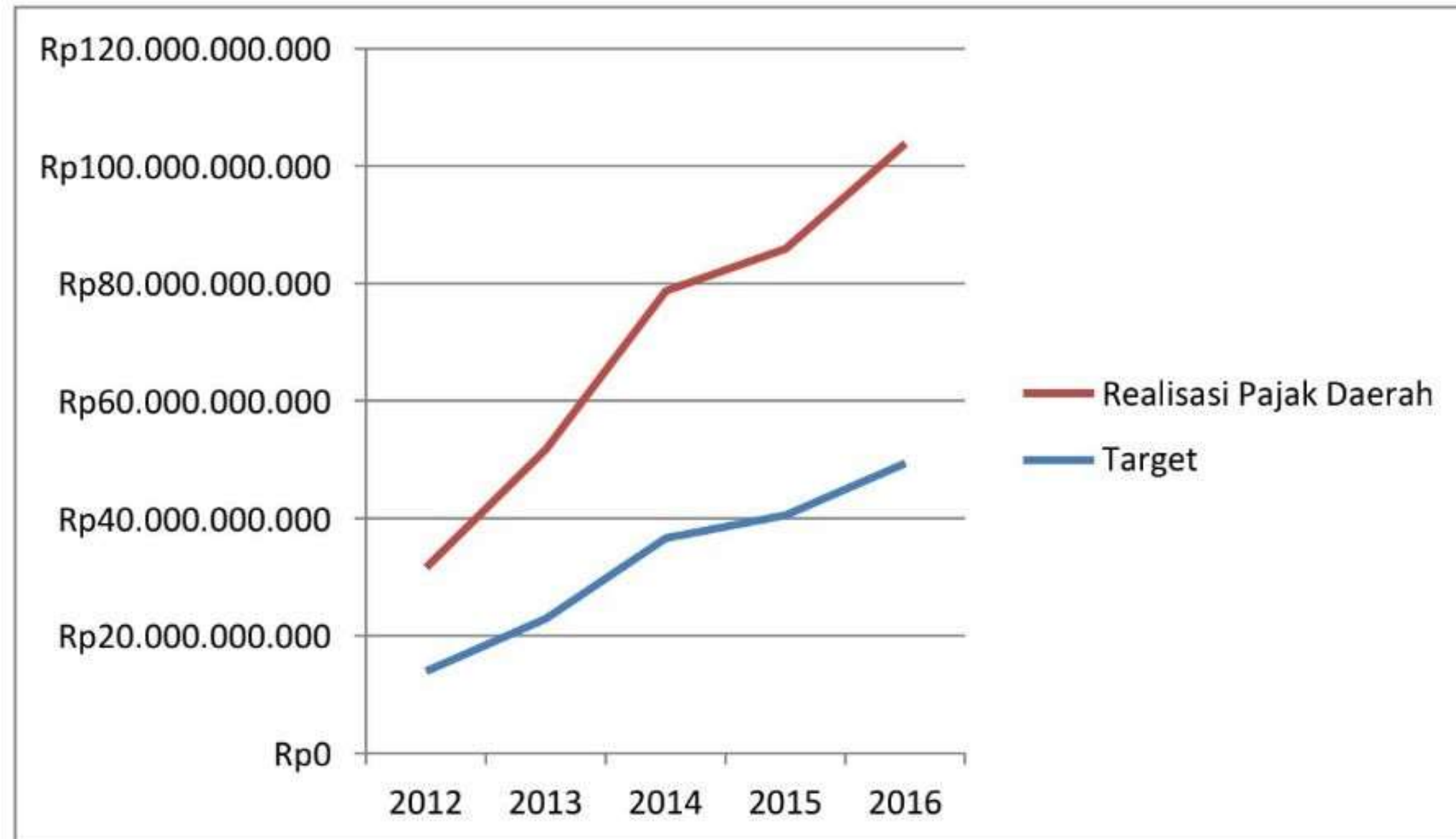
Sumber : BPKD Kab. Ciamis, 2021.

Melalui grafik diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sepanjang observasi penelitian, realisasi pajak daerah di Kabupaten Ciamis selalu diatas target. Namun tren tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya COVID-19. Tren kembali meningkat pada tahun 2021 karena Indonesia sudah mulai proses *recovery* perekonomian secara nasional maupun daerah. Walaupun terkesan maksimal pada visual data, namun perlu ditelusur lebih dalam mengenai perhitungan efektivitasnya.

Grafik 1. diatas menunjukkan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis. Terealisasinya pajak daerah diatas target yang telah disepakati menandakan bahwa Kabupaten Ciamis memiliki kinerja keuangan yang baik, jika dilihat berdasarkan pendapatan pajak daerah. Menurut (BPS, 2021), Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten dengan pendapatan perkapita tergolong rendah. Artinya terdapat *gap* atau kesenjangan antara pungutan yang diwajibkan dengan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Dalam fenomena ini, efektivitas pajak daerah menjadi tidak berarti ketika itu justru tidak sebanding dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ciamis sebagai wajib pajak.

Apabila melakukan komparasi dengan target & realisasi pada lima tahun sebelum observasi penelitian ini, yakni pada tahun 2012-2016 maka dapat ditemukan perbedaan yang signifikan. Untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yang lebih mendalam, maka berikut ini disajikan data atau tabel penerimaan dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Ciamis pada tahun 2012-2016 :

Grafik 2. Target & Realisasi Pajak Daerah Kab. Ciamis



Sumber : BPKD Kab. Ciamis, 2016

Melalui pengamatan pada grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa target dan penerimaan pajak daerah pada lima tahun sebelumnya yakni 2012-2016 terus mengalami peningkatan dan tidak ada distraksi atau gangguan pada masing-masing tahun. Namun jika diamati lebih lanjut, maka peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2021 meningkat lebih dari 100%. Artinya, perolehan ini menandai bahwa Kabupaten Ciamis memiliki kinerja yang baik dalam hal pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah pendapatan asli daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan perekonomian (Lovianna & Rahmi, 2022). Perekonomian suatu daerah merupakan cerminan atas kontribusi beberapa hal seperti tingkat konsumsi, tingkat belanja pemerintah daerah, tingkat investasi dan beberapa instrumen lain

seperti ekspor. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu modal dasar untuk mencapai tingkat perekonomian yang *steady growth*. Melalui pendapatan pajak, Pemerintah Daerah dapat membiayai berbagai infrastruktur produktif yang dapat memberikan investasi jangka panjang. Selain itu, pajak daerah juga merupakan bagian dari fiskal untuk mengontrol tingkat peredaran uang yang berpengaruh langsung terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peranan yang vital dalam siklus perekonomian daerah.

Penulis berasumsi bahwa lebih tingginya realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga menandakan pada level tinggi. Namun pada faktanya, mayoritas masyarakat di Kabupaten Ciamis memiliki pendapatan perkapita yang tergolong rendah dibandingkan Kabupaten lainya di Provinsi Jawa Barat. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah di Kabupaten Ciamis. Efektivitas memiliki makna sederhana tepat sasaran, tepat tujuan dan dialokasikan sesuai dengan yang seharusnya. Hasil yang efektif seharusnya memiliki *output* berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun *output* dari analisis kontribusi adalah menentukan unit mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap valuasi PAD selama observasi penelitian ini.

Dalam (Octovido, 2014) mengemukakan jika rasio diatas 60% atau 0,60 maka dapat dikatakan bahwa rasio penerimaan pajak daerah digolongkan sebagai efektif. Begitu juga sebaliknya jika rasio dibawah 60% atau 0,60 maka penerimaan pajak daerah digolongkan tidak efektif. Ketika hasil tidak efektif, memberikan interpretasi

bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan realisasi pajak daerah atau menurunkan target yang disepakai. Penelitian tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yakni penulis ingin menggunakan formula tersebut dalam menentukan efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Ciamis dengan observasi tahun 2017-2021.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian-uraian pada latar belakang, penelitian ini merumuskan beberapa poin masalah sebagaimana berikut :

1. Berapa persentase Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio efektivitas ?
2. Berapa persentase Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2021 dengan menggunakan rasio kontribusi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut ini merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini :

1. Untuk mengetahui berapa persentase Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2021 dengan menggunakan Rasio Efektivitas
2. Untuk mengetahui berapa persentase Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2021 dengan menggunakan Rasio Kontribusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber atau bahan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Adapun manfaat teoritis lainnya adalah, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi atau mengisi *gap* penelitian terdahulu dengan 9nstr serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan mafaat sendiri bagi penulis terutama dalam mengasah keterampilanya dalam analisis ekonomi.

b. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan atau sumber ilmu pengetahuan bagi seluruh civitas akademika universitas.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam merancang kebijakan-kebijakan yang memiliki relevansi dengan pajak daerah.

